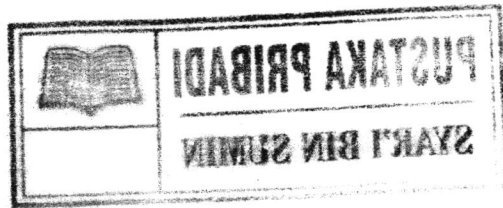




**40 TAHUN
KOTA PAYAKUMBUH**

Dari Soetan Oesman Hingga Josrizal Zain



FAJAR RILLAH VESKY
RENDRA TRISNADI

**40 TAHUN
KOTA PAYAKUMBUH**

Dari Soetan Oesman Hingga Josrizal Zain

FAJAR RILLAH VESKY
RENDRA TRISNADI

40 TAHUN
KOTA PAYAKUMBUH
Dari Soetan Oesman Hingga Josrizal Zain

Disain Sampul & Layout Isi:
Romi

Dicetak oleh:
VISIgraf

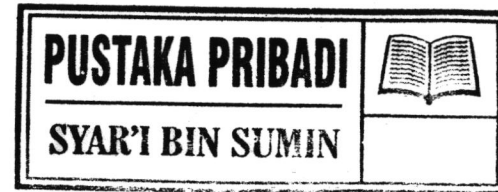
ISBN:
978-602-99238-0-3

Cetakan Pertama:
Desember 2010

Diterbitkan oleh:
CV Angrek Perdana
bekerjasama dengan
Pemko Payakumbuh

Buku ini tidak untuk diperjualbelikan

©Hak Cipta terpelihara dan dilindungi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
Tidak dibenarkan menerbitkan ulang bagian atau keseluruhan isi buku ini
dalam bentuk apapun juga sebelum mendapat izin tertulis dari Penerbit



HANTARAN PENERBIT

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, berkat nikmat dan karunia-Nya, buku “40 Tahun Payakumbuh Dari Soetan Oesman Hingga Josrizal-Zain” ini dapat diterbitkan.

Penerbitan buku ini tidak terlepas dari kerja keras dua penulis, bantuan referensi dari banyak pihak, dan ketersediaan anggaran dari Bagian Humas Pemko Payakumbuh.

Buku ini tidak sekedar dipersembahkan untuk memperingati 40 tahun Payakumbuh, tetapi juga dimaksudkan sebagai bahan bacaan bagi generasi muda dan tambahan referensi bagi siapa saja yang ingin tahu tentang Payakumbuh.

Akhir kata, penerbit mengucapkan selamat membaca! Selamat mengarungi perjalanan Payakumbuh dalam 40 tahun terakhir. Bila terdapat kesalahan dalam penulisan nama ataupun

data, tentu saja akan menjadi bahan perbaikan untuk penerbitan berikutnya.

Terimakasih atas bantuan dan kerjasama kita. Sekali lagi, selamat membaca!

Payakumbuh, Desember 2010,

Penerbit
CV Angrek Perdana

SAMBUTAN

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Saya menyambut penerbitan buku “40 Tahun Kota Payakumbuh” ini dengan penuh rasa bangga serta syukur kehadiran Allah SWT. Sebuah referensi yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mengenal kota Payakumbuh yang sesungguhnya.

Terbitnya buku yang menyajikan perjalanan kota Payakumbuh menghadapi segala tantangan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Melalui buku ini kita kenang para pemimpin yang telah berjasa membangun kota yang kita cintai ini. Lewat buku ini pula, kita abadikan sejarah, perkembangan kota, hingga catatan kepemimpinan kota Payakumbuh.

Satu hal yang sangat saya yakini, segala keberhasilan yang kita peroleh sejauh ini tak luput dari aspek kebersamaan. Dukungan dan keterlibatan segenap elemen masyarakat merupakan kunci sukses dalam merumuskan kebijaksanaan

sekaligus menjalankan pembangunan yang telah direncanakan. Karenanya, jangan sampai rantai kebersamaan ini putus seiring berlalunya waktu.

Tak lupa saya sampaikan ucapan terima-kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan buku ini, mulai perumusan ide, penulisan, penyusunan, dan peluncuran buku ini nantinya. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut, dan berharap akan terbit buku lain lagi tentang kota Payakumbuh yang mengupas perkembangan kota Payakumbuh dari sisi berbeda.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi perjuangan kita membangun kota ini menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Amin.

Payakumbuh, Desember 2010

Capt H. JOSRIZAL ZAIN SE MM

SAMBUTAN

KETUA DPRD PAYAKUMBUH

Sebagai sebuah kota yang terus merangkak maju dan meraih beragam prestasi, wajarಾಗaknya jika Payakumbuh membagi pengalaman baik ataupun buruknya lewat rangkaian kata yang tertera dalam buku ini. Secara representatif buku ini dapat memberikan berbagai informasi dan gambaran tentang Kota Payakumbuh dari mula berdiri hingga usianya 40 tahun kini.

Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik terbitnya buku 40 Tahun Kota Payakumbuh ini. Sebuah persembahan untuk para pendiri dan pemimpin kota Payakumbuh dulunya. Berikut sebagai sebuah prasasti perjalanan kota Payakumbuh yang dapat dibaca sekarang ataupun dimasa yang akan datang.

Gambaran perjuangan, pembangunan dan perkembangan yang direkap dalam buku ini adalah sebuah acuan yang baik menuntaskan pembangunan selanjutnya. Segala pengalaman keberhasilan dan kegagalan pimpinan kota, semestinya dijadikan

evaluasi diri guna menentukan arah kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan kedepan.

Penyusunan buku ini tentunya tak lepas dari usaha berbagai pihak. Saya mengucapkan terima-kasih atas pengabdian berbagai pihak dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kota Payakumbuh selanjutnya.

Payakumbuh, Desember 2010

Wilman Singkuan, S.Sos

SAMBUTAN

BUPATI LIMAPULUH KOTA

Saya menyambut gembira hadirnya buku tentang 40 Tahun Payakumbuh ini, sebagai media komunikasi lintas generasi dalam melestarikan sejarah perjalanan Kota Payakumbuh semenjak mula berdiri. Sebuah referensi yang luar biasa bagi pelajar dan para pemuda Luak Limopuluah, khususnya Payakumbuh sebagai penerus dan pengembang Payakumbuh ke depan.

Buku ini bukan saja menjadi kebanggaan Kota Payakumbuh, tapi juga kebanggaan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. Karena pada dasarnya Payakumbuh dan Limapuluh Kota adalah sama. Keduanya hanya terpisah secara administratif sejak Payakumbuh berdiri sendiri sebagai sebuah kotamadya pada 40 tahun lalu. Tapi, selamanya, sejarah Kota Payakumbuh takkan pernah lepas dari nama Kabupaten Limapuluh Kota.

Bahkan dalam keseharian kita, tak jarang masyarakat Limapuluh Kota menyebut Payakumbuh sebagai tempat

tinggalnya. Tak jarang pula masyarakat daerah lain di Sumbar ini yang menganggap Limapuluh Kota adalah Payakumbuh, begitu pula sebaliknya. Rasanya tak ada yang salah dengan anggapan itu, *toh* dulunya memang begitu. Terpisah menjadi dua daerah administratif bukan alasan terus-menerus mencari berbagai perbedaan, tetapi bagaimana kedua daerah saling menguatkan dalam kebersamaan.

Saya sangat menyadari kemajuan Payakumbuh adalah kemajuan Limapuluh Kota. Oleh karenanya, Payakumbuh dan Limapuluh Kota harus terus saling bekerjasama dan menjaga hubungan baik. Segala bentuk kebijakan dan pembangunan Payakumbuh yang berujung kepada kesejahteraan masyarakatnya, akan didukung Limapuluh Kota. Bila diperlukan, dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan Limapuluh Kota. Demikian pula sebaliknya. Sinergisitas kabupaten dan kota di Luak Nan Bungsu ini harus terus ditingkatkan.

Sebagai saudara, kiranya masyarakat Limapuluh Kota perlu pula membaca buku 40 Tahun Payakumbuh ini, sebagaimana buku ini menjadi bacaan wajib masyarakat Payakumbuh. Dan semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat sebagai pijakan kita melangkah ke depan.

Terakhir, mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah SWT selalu mengikat kuat persaudaraan kita dan selalu memudahkan perjuangan daerah kita kedepan. Atas nama pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, saya menyampaikan Dirgahayu 40 Tahun Kota Payakumbuh.

Sarilamak, Desember 2010
Bupati Limapuluh Kota
dr ALIS MARAJO Dt SORI MARAJO

DAFTAR ISI

AWAL MULA
SEBUAH KOTA
(1)

ZAMAN
SOETAN OESMAN
(17)

KEPEMIMPINAN
MASRIMS
(32)

ZAMAN
MUZAHAR MUCHTAR
(41)

ZAMAN
MUCHTIAR MUCHTAR
(53)

ZAMAN
FAHMY RASYAD
(66)

ZAMAN
DARLIS ILYAS
(74)

ERA
YULRIZAL BAHARIN
(85)

ERA KEPEMIMPINAN
JOSRIZAL ZAIN-
BENNY MUCHTAR
(88)

ERA KEPEMIMPINAN
JOSRIZAL ZAIN-
SYAMSUL BAHRI
(110)

BUKAN
PEMIMPIN BIASA
(221)

Drs SOETAN OESMAN (1970-1978)
Ketika Raja Menjadi Walikota
(223)

DRS H MASRI MS
"Kunci Inggris" Sang Politisi
(233)

Drs MUZAHAR MUCHTAR DATUAK SIRI DIRAJA
Birokrat Cerdik dari Ampang Gadang
(241)

Drs H MUCHTIAR MUCHTAR
St MANGKUTO SATI
Sang Pendobrak Budaya Korupsi
(251)

Drs H Fahmi Rasyad SH
Yang Setia Mengurus Rakyat
(265)

H Darlis Ilyas SH
Legenda Sang Kontroversial
(281)

Capt H Josrizal Zain SE MM:
Mantan Nakhoda Mencatat Sejarah
(290)

Ir H Benny Muchtar MM
Mimpi Seorang Anak Kubang
(305)

AKBP H SYAMSUL BAHRI DATUAK BANDARO PUTIAH:
"Kesetiaan Seorang Polisi"
(314)

PYAKUMBUH
YANG DIIMPIKAN
Gali Potensi, Pahami Keunggulan
Oleh: RIZA FALEPI ST MT
(330)

Perlunya Membatasi Fungsi Kota
Oleh: Drs H Muchtiar Muchtar
(336)

Pembangunan Agama: Dulu, Kini dan Esok
Oleh: DR H Syar'i Bin Sumin MA
(343)

Berharap Sinergisitas Payakumbuh dan Limapuluh Kota
Oleh: Drs H Azmi Syahbuddin
(347)

AWAL MULA SEBUAH KOTA

Bermula dari niat membentuk Wilayah Istimewa Kabupaten 50 Kota pada tahun 1950, tokoh masyarakat dan pemerintah akhirnya sepakat menjadikan Payakumbuh sebagai sebuah kotamadya. Enam tahun setelah kesepakatan itu dibuat, baru pemerintah menerbitkan UU Nomor 8 tahun 1950 tentang pembentukan Payakumbuh, Sawahlunto, Padangpanjang, Solok dan Pekanbaru. Tapi sayang, karena terantuk masalah batas, meletusnya PRRI dan PKI serta terjadinya tumpang-tindih regulasi, Kotamadya Payakumbuh baru dapat diresmikan pada 22 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Inilah, awal mula Kota Payakumbuh!

TRIWULAN pertama tahun 1950, Republik Indonesia khususnya Keresidenan Sumatera Barat baru saja diporak-porandakan oleh Agresi II Belanda. Rakyat beserta pemerintah 8 luhak atau

kabupaten mulai dari Padang, Painan, Kerinci, Tanahdatar, Agam, Limopuluah Koto, Solok sampai Luhak Kecil Talu, sangat menderita.

Khusus untuk Luhak Limopuluah Koto, penderitaan yang dirasakan rakyat benar-benar menggetirkan. Bocah-bocah sering menangis kelaparan. Kebutuhan pokok seperti beras susah didapatkan. Untuk makan sehari-sehari rakyat terpaksa mencampur beras dengan jagung dan ubi-ubian.

Selain kerap menderita kelaparan, warga Limopuluah Koto juga banyak menderita penyakit kulit, kudis dan kurap. Seperti dirasakan sebagian besar warga Ampang Gadang, Situjuh, Halaban, Koto Nan Godang, Payobasuang, Tiaka, dan sejumlah kampung-kampung lainnya. Kondisi ini diduga terjadi akibat bahan pakaian yang susah didapatkan. Saking susahnyanya, tidak sedikit warga memakai baju dan celana dari kulit pohon tarok atau pohon ketapang (*terminalia catapa*).

Seperti diketahui, kulit pohon tarok yang pernah disebut-sebut dalam cerita "*Max Havelar*" karya Multatuli alias Douwes Dekker (1820-1887) memang dikenal sebagai tempat berlindung paling nyaman bagi hewan kecil sejenis tumo (kutu). Hewan-hewan inilah yang menggigit kulit warga, sehingga menimbulkan berbagai penyakit.

Buruknya kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat Luhak Limopuluah Koto pada pertengahan tahun 1950, ternyata juga berdampak hebat terhadap suasana kerja pemerintah daerah setempat. Dibawah kepemimpinan bupati Sa'alah Yusuf Soetan Mangkuto, pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik. Salah satunya dengan merancang wilayah berdasarkan kecamatan yang sudah ada. Terdiri dari 7 kecamatan dan 90 nagari.

Sayang upaya ini belum membuahkan hasil signifikan. Sebab di tengah jalan, Sa'alah Yusuf Soetan Mangkuto terpilih pula sebagai anggota Dewan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Otomatis tugas-tugasnya sebagai kepala daerah harus digantikan. Penggantinya adalah H Darwis Datuak Tumanggung, tokoh asal Nagari Taram, Kecamatan Harau.



■ H Darwis Dt Tumanggung

Dengan dilantiknyanya H Darwis Datuak Tumanggung sekitar bulan Maret 1950, berarti saat itu sudah tujuh tokoh yang pernah memimpin Luhak Limopuluah Koto. Lima tokoh sebelumnya adalah Arisun Soetan Alamsyah, Alifudin Saldin, BA Murad, dr Adnan WD dan Syafiri Soetan Pangeran.

Begitu dilantik memimpin tanah kelahiran, Darwis Datuak Tumanggung langsung bertekad memulihkan keadaan daerah. Untuk itu dia tetap melanjutkan rencana yang sudah dibuat Sa'alah Yusuf Soetan Mangkuto, yakni merancang konsep pem-

bentukan wilayah.

Mula-mula Darwis Datuak Tumanggung merancang pembentukan wilayah berdasar kecamatan yang sudah ada. Persis dengan ide zaman kepemimpinan Sa'alah Yusuf Mangkuto. Selanjutnya, ide itu ditambah dengan membentuk satu wilayah istimewa atau disebut Wilayah Teritorium Kabupaten 50 Kota.

Rencananya, Wilayah Teritorium ini terdiri dari nagari-nagari yang ada dalam Kota Payakumbuh sekarang, seperti Koto Nan Godang dan Koto Nan Ompek. Tapi, ibarat menaiki sebuah sampan, gayung pembentukan Wilayah Teritorium oleh Pemerintah Kabupaten 50 Kota belum disambut baik. Dalam arti kata, masyarakat dari nagari-nagari yang ada di dalam kota Payakumbuh sekarang justru tidak terlalu mendukung. Sebaliknya, mereka justru mengusulkan agar Payakumbuh tidak menjadi Wilayah Istimewa dari Luhak Limopuluah Koto. Tetapi diciptakan sebagai Kota Kecil Otonom sebagaimana dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Kendati saat itu istilah demokrasi belum sepopuler sekarang, namun Pemerintah Luhak Limopuluah Koto cukup koperatif dengan saran masyarakat. Buktinya, bagian desentralisasi pada kantor bupati langsung ditugaskan untuk melakukan peninjauan ke nagari-nagari tadi.

Hasil peninjauan bagian desentralisasi menyimpulkan bahwa, tuntutan untuk menjadikan Payakumbuh sebagai kota kecil murni aspirasi masyarakat. Pemerintah Luhak Limopuluah Koto perlu menampung sekaligus mewujudkannya.

Atas kesimpulan Bagian Desentralisasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Limopuluah Koto, melalui Sidang Pleno tanggal 27 April sampai 2 Mei 1950 memutuskan setuju membentuk kota kecil Payakumbuh. Pihak eksekutif diminta mempersiapkan bahan yang diperlukan untuk dibicarakan pada sidang berikutnya.

Dengan lahirnya keputusan ini, sebagaimana pernah ditulis Ketua Realiasi Kotamadya Payakumbuh tahun 1970 almarhum HC Israr, Pemerintah Kabupaten Limopuluah Koto dibawah kepemimpinan Darwis Datuak Tumanggung akhirnya menggelar rapat dengan tokoh-tokoh masyarakat dari Nagari Koto Nan Ompek dan Koto Nan Godang.



■ Perguruan Mahad Islamy saksi rapat kecil pembentukan Kota Payakumbuh

Mantan Sekretaris Kabupaten Limapuluh Kota H Anwar ZA mencatat, ada dua kali rapat yang digelar pemerintah kabupaten 50 Kota dengan tokoh kedua nagari. Pertama, pada Jum'at 28 Juli 1950 bertempat di gedung Perguruan Mahad Islamy. Kedua, 16 September 1950 bertempat di Sekolah Muhammadiyah Bunian.

Dalam kedua rapat tersebut, Pemkab 50 Kota melalui Bupati H Darwis Datuak Tumanggung, sama-sama sepakat dengan tokoh nagari Koto Nan Godang dan Koto Nan Ompek untuk membentuk kota kecil Payakumbuh. Kesepakatan itu akan disampaikan kepada DPRK untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah atasan (pusat) dan parlemen Republik Indonesia.

Adapun tokoh Koto Nan Ompek dan Koto Nan Godang yang menghadiri rapat diantaranya adalah Nazar Rauf, Zainuddin Hamidy, Hakim Datuak Bandaro Hitam, Biran Marajo Alam, Datuak Marajo Adia, Syamsul Yahya, Nur Basyar Datuak Mamangun nan Hitam, Anwar Datuak Majo Bosa Nan Kuniang, dan Bachtiar Datuak Pado Panghulu.

Sekedar diketahui, Biran Marajo Alam adalah Wali Jorong Nunang dari 1950-1975. Sedangkan Anwar Datuak Majo Bosa Nan Kuniang merupakan Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi pada Kantor Gubernur Sumatera Tengah. Dalam kariernya Anwar yang asli putra Nagari Koto Nan Ompek pernah dipercaya menjadi Gubernur Sulawesi Tengah, dari 13 April 1964 hingga 13 April 1968.

Sementara Bachtiar Datuak Pado Penghulu (1907-1986) adalah anak kemenakan Suku Bendang, Jorong Nunang, Nagari Koto Nan Ompek. Usia 20 tahun dia merantau ke Bandung, Jawa Barat dan menjadi Siswa Sekolah Guru Tinggi (HKS). Setelah tamat Bachtiar pulang ke Ranah Minang dan selama berada di kampung, dirinya tertarik menekuni dunia politik.

Puncaknya, pada tahun 1935 Bachtiar Datuak Pado Panghulu terpilih menjadi anggota Gementeraad atau semacam anggota Dewan di Kota Bukittinggi. Lima tahun menjadi wakil rakyat di kota dingin itu, Bachtiar terpilih pula sebagai anggota Minangkabauraat atau semacam DPR Propinsi masa kini.

Dua tahun kemudian, Bachtiar diangkat menjadi Asisten Demang Bayang Painan dan Asisten Demang Tiltang Kamang. Pada tahun 1950 atau selepas Agresi II Belanda, Bachtiar ditunjuk sebagai Bupati Pesisir Selatan Kerinci (PSK). Ketika menjadi Bupati PSK inilah, Bachtiar yang dijuluki masyarakat sebagai "Bupati Atom" sangat intens mendorong lahirnya kota Kecil Payakumbuh.

TERANTUK MASALAH BATAS

Kembali pada hasil rapat Pemkab 50 Kota dengan anak Nagari Koto Nan Ompek dan Koto Nan Godang tentang pembentukan kota kecil Payakumbuh, rupanya juga mendapat dukungan dari Pamong Praja di Sumatera Tengah. Buktinya, Pramong Praja yang menggelar konfrensi kerja tanggal 26 Agustus 1950 turut mendukung rencana pembentukan kota kecil tersebut.

Walau demikian, bukan berarti pula Pemkab 50 Kota dan tokoh nagari-nagari tidak punya perbedaan pendapat. Buktinya, dalam menentukan mana kawasan yang menjadi kota sempat terjadi perselisihan pandangan antara kedua belah pihak. Pada satu sisi, Pemkab 50 Kota menghendaki daerah yang dijadikan kota itu adalah daerah sekitar pasar. Kalau digambarkan pada kondisi sekarang, Pemkab 50 Kota hanya ingin kota kecil Payakumbuh berada antara Simpang Benteng sampai Simpang Telkom dan Bunian sampai Ibuah.

Sementara pada sisi lain, anak nagari Koto Nan Ompek dan Koto Nan Godang tidak setuju dengan usulan pemerintah



■ Bachtiar Datuak Pado Penghulu (1907-1986)

kabupaten 50 Kota. Mereka beranggapan, kalau pendapat pemerintah kabupaten dipakai berarti kedua nagari terpotong-potong. Kalau Koto Nan Ompek terpotong dan Koto Nan Godang terbelah, tentu kesatuan hukum adat juga ikut-ikutan retak. Makanya tokoh-tokoh masyarakat dari Nagari Koto Nan Ompek dan Nagari Koto Nan Godang tetap bersikukuh agar daerah mereka masuk secara utuh dalam wilayah kota kecil Payakumbuh.

Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa kompaknya masyarakat Koto Nan Ompek dan Koto Nan Godang pada zaman tersebut. Sehingga lucu sekali rasanya jika dewasa ini ada oknum yang coba-coba 'mengusik' kemesraan kedua nagari. Kepada oknum itu agaknya kita juga perlu bertanya, apakah dia tidak membaca masa silam? Masa dimana Koto Nan Ompek dan Koto Nan Godang, bersatu untuk membentuk Kota Payakumbuh.

Langkah Koto Nan Ompek dan Koto Nan Godang itupula yang membuat pemerintah kabupaten 50 Kota, tak bisa menahan lagi segala keinginan masyarakat. Sehingga dengan ikhlas menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kota Kecil Payakumbuh yang Otonom.

Ranperda yang terdiri dari V Bab tersebut, akhirnya secara aklamasi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 8/BLK/P-50, dalam sidang Pleno ke III DPRK tertanggal 23 Oktober 1950. Inilah Perda pertama yang menyinggung-nyinggung soal Payakumbuh. *Sayang, sekarang tidak diketahui lagi, apakah Perda tersebut masih tersimpan sebagai lembaran daerah atau tidak?*

UU YANG TERKENDALA

Balik lagi kepada pembentukan kota kecil Payakumbuh. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang kota kecil Payakumbuh yang dibuat pemerintah Kabupaten 50 Kota disetujui DPRK pada Oktober 1950, ternyata Payakumbuh belum langsung menjadi sebuah kota. Karena masih harus menunggu keputusan dari pemerintah atasan atau pemerintah pusat.

Baru pada tahun 1956, turun Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan 5 Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Kelimanya adalah

Pekanbaru, Sawahlunto, Padangpanjang, Solok, dan Payakumbuh. Harian Penerangan yang terbit di Padang dalam edisi Nomor 205 (Jum'at, 13 April 1956) memuat secara lengkap Undang-Undang tersebut. Sehingga membuat masyarakat Sumatera Tengah mengetahuinya secara luas.

Tapi jangan beranggapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 ini membuat Payakumbuh langsung menjadi sebuah kota kecil. Sebab dalam UU yang terdiri dari V BAB dan 18 Pasal tersebut dinyatakan, bahwa Payakumbuh dan Solok harus menunggu terlebih dahulu Peraturan Menteri tentang batas daerah. Adapun Peraturan tentang Batas kota dari Menteri Dalam Negeri barusan bisa dilahirkan, apabila Pemerintah Kabupaten 50 Kota dan Propinsi Sumatera Tengah sudah menyampaikan bahan-bahan usulan.

Bahan-bahan usulan itulah yang sedikit sulit dihadirkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota. Hal ini terjadi karena munculnya berbagai dinamika. Mulai dari terjadinya perebutan Pasar Serikat, belum tuntasnya masalah batas, sampai munculnya berbagai undang-undang baru yang terkesan tumpang tindih.

Akibat kendala-kendala tersebut, sampai tahun 1957 kota kecil Payakumbuh belum juga lahir. Kendati demikian, semangat masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan 5 kota masih menggebu-gebu. Dalam semangat yang begitu menggebu, tak tahunya Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) meletus pula di Sumatera Tengah pada tahun 1958. Walau tujuan PRRI bukanlah menuntut pembebasan Sumbar dari Indonesia, melainkan mendesak otonomi yang luas kepada pemerintah pusat. Tetapi stabilitas daerah benar-benar terguncang dibuatnya.

Apalagi banyak diantara warga Payakumbuh terlibat dalam konflik perang saudara tersebut. Akibatnya, sampai tahun 1963, realisasi kota kecil Payakumbuh masih seperti menggantung asap dan mengukir langit: sangat sulit untuk diwujudkan!

Baru pada tahun 1964, Gubernur Sumbar Khairuddin Datuak Rangkyo Basa, meninjau kembali rencana pembentukan Kota Payakumbuh dan Kota Solok. Peninjauan dari Gubernur 'hebat'

ini ternyata tidak sia-sia. Pada tahun 1965, Pemerintah Pusat Melahirkan UU No 18 tahun 1965, tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

Dampak dari peraturan tersebut, Panitia Realiasi Kotamadya Payakumbuh pun terbentuk. Panitia dipimpin Marius Datuak Bandaro. Dibantu anggota Amarullah Nur, Abizar, Ahmad Samad BA, Peltu M Yusuf St Sati, Inspektur II M Nusi, Syahrial Soetan Mangkudun, Nursian M BA, Ranuli Ismail, Aiptu I Syies Jamrud.

Sayang sekali, belum lama dibentuk. Panitia Realiasi Kotamadya Payakumbuh gagal melakukan tugasnya lantaran diterpa isu terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, sampai tahun 1969, lagi-lagi upaya menjadikan Payakumbuh sebagai kota kecil belum terwujud.

Meski begitu ada beberapa perkembangan cukup bagus, seperti munculnya keinginan masyarakat Nagari Aia Tabik, Limbukan, dan Lampasi untuk bergabung dengan Payakumbuh. Dengan demikian sudah tujuh nagari yang berkeinginan membuat kota kecil. Empat nagari lainnya adalah Koto Nan Ompek, Koto Nan Godang, Payobasuang, dan Tiaka.

BUAH PEMILU 1971

Singkat cerita, memasuki awal tahun 1969 atau selepas pemberontakan PKI, pembicaraan tentang Pembentukan Payakumbuh menghangat lagi. Apalagi pemerintah pusat mengeluarkan UU Nomor 16 tahun 1969, tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD. Setahun kemudian muncul pula Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 1969.

Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk Daerah Pemilihan/Daerah tingkat I Sumbar adalah sebanyak 14 orang. Sedangkan Sumatera Barat waktu itu baru punya 8 kabupaten dan 4 kotamadya. Artinya, menjelang Pemilu 1971 berlangsung, harus dibentuk dua kota lain yakni Payakumbuh dan Solok.

Dengan adanya peraturan tersebut, semangat warga di Luhak Limopuluah untuk menjadikan Payakumbuh sebagai sebuah kota akhirnya kembali menggelora. Ini ditandai dengan terbentuknya

Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh. Panitia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumbar tanggal 8 Juli 1970 Nomor 95/GSB/70 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah II Kabupaten 50 Kota tanggal 1 Agustus 1970 Nomor Keputusan 16/Blk 70.

Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh ini dipimpin oleh HC Israr. Dalam tugasnya HC Israr dibantu dua wakil ketua, dua sekretaris, dan 18 anggota. Sebagai wakil ketua adalah Buchari Kamil dan Mansur Surin BA. Sebagai sekretaris Syahrudin dan Sahar Ismail Datuak Kakamo. Khusus Sahar Is Datuak Kakamo sampai sekarang masih dipanjangkan umurnya. Ayah wartawan Posmetro Padang Nur Akmal dan wartawan Mingguan Detik News Nailul Badri ini menetap di Kelurahan, Padang Tengah Payobada, Kecamatan Payakumbuh Timur.

Sedangkan anggota Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh adalah Marius Datuak Bandaro, Syahrial S Datuak Mangkudun, AKP M Nusi, Ipda Syies Jamrud, Amrullah Nur, H Ramli Datuak Paduko Marajo, Agus Marahi, D Datuak Rajo Malano, Nur Basyar Datuak Mamangun Nan Hitam, Busri AN Datuak Bandaro, AM Datuak Majo Bosa, N Datuak Sati Nan Balapiah, Ja'far Sidik BA, Buchari Idris. AH Datuak Rajo Indo Angso Nan Ratiah, Lettu Usman Saat dan Saidan Datuak Rajo Sulaiman.

Khusus nama terakhir yakni Saidan Datuak Rajo Sulaiman masih diberi umur panjang. Bahkan dalam usia Payakumbuh yang memasuki 40 tahun pada Desember 2010, Saidan Datuak Rajo Sulaiman masih sehat. Pria yang akrab dipanggil ayah ini menetap di Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan masih sering memberi komentar pada media-massa termasuk melalui *Harian Pagi Padang Ekspres*.

Kita tinggalkan dulu cerita tentang Saidan Datuak Rajo Sulaiman, kembali lagi kepada Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh. Setelah resmi dibentuk, panitia akhirnya mulai melaksanakan berbagai tugas-tugas. Utamanya tugas yang berkaitan dengan inventarisir data 7 nagari, sumber keuangan, batas kota dan gedung-gedung yang dibutuhkan untuk sarana pendukung pemerintah.

Terkait gedung, panitia mendapatkan gedung yang cukup representatif untuk Balai Kota. Gedung itu berada di Jalan H Agus Salim (sekarang Jalan Soetan Oesman), milik warga keturunan Wiliam Hakim. Sedangkan soal sumber keuangan Payakumbuh untuk tahun pertama diperkirakan minimal Rp12 juta.

Mengenai batas Kotamadya Payakumbuh, panitia pada tanggal 12 November 1970 menggelar musyawarah di Kantor Bupati Limapuluh Kota. Dalam musyawarah tersebut menurut mantan Bupati Limapuluh Kota Aziz Haili dan HC Israr berhasil diperoleh kata sepakat tentang pembentukan 6 titik batas kota.

Titik pertama adalah batas jalan jurusan Piladang di Aia Tagang atau Kicang Dapek (sekitar 6,7 kilometer dari Payakumbuh). Titik kedua, batas jalan jurusan Tanjungpati di Padang Gantiang (5,7 kilometer dari pusat kota). Ketiga, batas jalan jurusan Suliki di sebelah Utara jembatan Lampasi (4,1 kilomere dari pusat kota).

Titik keempat adalah batas jalan jurusan Taram di Tunggua Jua, sebelah Timur jembatan Sikali (6,5 kilometer dari pusat kota). Titik kelima batas jalan jurusan Batang Tabik di Kincia Cino atau Kubu Kacang (5 kilometer dari pusat kota). Dan titik keenam batas jalan jurusan Situjuh di Limpau Kapeh (6,5 kilometer dari pusat kota).

Setelah 6 titik batas Kotamadya Payakumbuh itu disepakati, panitia bersama peserta rapat langsung memasang tanda batas. Beberapa hari setelah tanda batas dipasang, muncul surat protes dari masyarakat Tigo Aua Piladang atau Koto Tengah Batu Hampar. Mereka meminta agar batas kota jurusan Piladang dimundurkan 1 kilometer ke pusat kota, yaitu sekitar 200 meter dari Kandang Babi atau Jembatan Bawah Burai.

Untung aksi protes warga Piladang ini dapat diredakan dengan bijaksana oleh Bupati 50 Kota A Syahdin. Beliau memutuskan membuat batas kota Payakumbuh jurusan Piladang antara kawasan Aia Taganang dengan batas yang dituntut warga. Dengan demikian masalah akhirnya dapat diselesaikan.

DIRESMIKAN AMIR MACHMUD

Usai menetapkan batas kota, menyusun data 7 nagari yang akan bergabung ke dalam kota, serta menginventarisir bangunan buat sarana pemerintahan dan rumah walikota. Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh melapor kepada Bupati Limapuluh Kota, Gubernur Sumatera Barat serta Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi, Kementerian Dalam Negeri.

Hasilnya, pada tanggal 21 September 1970, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan konsep realisasi pembentukan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh. Dalam konsep tersebut ditegaskan bahwa kedua kota untuk sementara menyandang status peralihan hak. Jika DPRD hasil Pemilu 1971 sudah terbentuk, baru statusnya disempurnakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berkaitan dengan keuangan Kotamadya Payakumbuh disepakati masih bergantung pada Kabupaten 50 Kota, selama tahun anggaran berjalan. Apabila ada biaya yang tidak disediakan kabupaten menjadi tanggungjawab pemerintah propinsi. Selanjutnya, Departemen Dalam Negeri akan memberi bantuan uang sebesar Rp2,5 juta untuk pengadaan perlengkapan pertama.

Setelah semua tetek-bengek keuangan itu diselesaikan, tugas Panitia Realisasi Kotamadya Payakumbuh dinyatakan berakhir dengan sukses. Selanjutnya dibentuklah Panitia Peresmian Kotamadya Payakumbuh. Peresmian sendiri sesuai Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor SDP.9/6/181 akan digelar tanggal 17 Desember 1970.

Adapun Panitia Peresmian Kotamadya Payakumbuh langsung dipimpin oleh Ketua Umum Bupati 50 Kota A Syahdin. Dengan Wakil Ketua Umum Bukhari Kamil (Wakil Ketua DPRD Gotong Royong Limapuluh Kota), Ketua Pelaksana I Syafril Ahmad SH (staf kantor bupati), Ketua Pelaksana II A Morel Hamid Datuak Rajo Indo Anso Nan Ratiah (tokoh masyarakat Nagari Koto Nan Ompek), dan Ketua Pelaksana III Agus Marahi (Wali Nagari Payobasuang).

Sedangkan Sekretaris Umum Panitia Peresmian Kotamadya Payakumbuh dipercayakan kepada Syahrudin (Camat Luhak),

Sekretaris I Harzi Zein (staf kantor bupati), Sekretaris II Sahar Ismail Datuak Kakomo (staf kantor bupati), dan Sekretaris III Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie (LKAAM). Sementara Bendahara dipercayakan kepada Syamsir Alim yang saat itu merupakan pimpinan BNI 1946 Payakumbuh.

Begitu selesai dibentuk, panitia langsung kerja keras mempersiapkan peresmian. Acara peresmian berpusat di Kantor Balaikota Payakumbuh Jalan Haji Agus Salim yang kemudian berganti nama menjadi Jalan Kodya dan Jalan Soetan Oesman.

Menurut HC Israr dan Sahar Ismail Datuak Kakamo, acara peresmian Kotamadya Payakumbuh berlangsung sangat meriah. Dihadiri Menteri Dalam Negeri Amir Machmud yang dikenal sebagai 'bolduzer politik' rezim Orde Baru. Saat peresmian digelar, perwakilan *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang* menyuguhkan sebuah maket berbentuk rumah gadang kepada Amir Machmud. Maket itu ditutup layar sutera biru. Di depannya terletak sepiring galamai (makanan khas Payakumbuh) dengan sebilah pisau. Mendagri Amir Machmud langsung dipersilahkan untuk mengirisnya.

Ketika gelamai diiris, putuslah benang yang ada di dalam gelamai, terbukalah selubung layar rumah gadang. Setelah layar terbuka, muncul tulisan Kotamadya Payakumbuh. Bersamaan dengan itu, meriam pusaka 'lelo majenun' langsung berdentum keras. Bunyinya seakan memberi kabar bagi anak nagari, bahwa Menteri Dalam Negeri Amir Machmud sudah dipersilahkan memasuki daerah Kotamadya Payakumbuh. Sang menteri juga telah meresmikan sebuah kota baru di Indonesia.

Terkait acara pengirisan galamai oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, menurut HC Israr dan Sahar Ismail Datuak Kakamo, memiliki filosofi yang sangat mendalam. Dikatakan, galamai adalah makanan spesifik Payakumbuh. Terbuat dari tepung beras, gula tebu, santan kelapa dan bumbu secukupnya. Proses pembuatan berlangsung kerjasama yang sangat apik: bahan disediakan kaum ibu dan pengadukan dalam kualii dilakukan para pria.

Cara mengaduk galamai mempunyai teknik tersendiri yang lazim disebut *mangacau galamai*. Terlalu kacau akan membuat

galamai berpelantingan (berserakan). Sebaliknya, kurang kacau akan menjadikan galamai seperti kotoran kambing (bergumpulan). Untuk itu diperlukan keseimbangan, kearifan dan kebijaksanaan.

Ketika galamai dalam kualiti matang, makanan tradisional itu juga tidak bisa langsung disantap. Tapi harus dituangkan dulu ke dalam sebuah piring. Jika sudah sedikit dingin baru dipotong dengan menggunakan pisau tajam. Kalau pisau tidak tajam galamai tidak akan putus.



■ Menteri Dalam Negeri Amir Machmud memasuki tempat upacara peresmian Kotamadya Payakumbuh, setelah disambut dengan tari Galombang dan siriah carano, 17 Desember 1970.

Segala proses pembuatan galamai itulah yang diyakini HC Israr dan Sahar Ismail Datuak Kakomo, mirip betul dengan karakter atau gambaran masyarakat Kota Payakumbuh. Menurut mereka berdua, galamai memberi makna kias bahwa enak tak bisa langsung diputus, manis tak bisa langsung ditelan. Makanya, dibutuhkan pemimpin yang arif, bijaksana dan berani dalam memimpin Kota Payakumbuh.

“Galamai juga memiliki makna yang sesuai dengan filosofi masyarakat Minangkabau, yakni tagang bajelo-jelo, kandua badantiang-dantiang. Artinya keras tapi penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan. Lunak tapi berprinsip tegas,” kata HC Israr dalam buku autobiografinya dan Sahar Ismail Datuak Kakomo

dalam buku catatan hariannya.

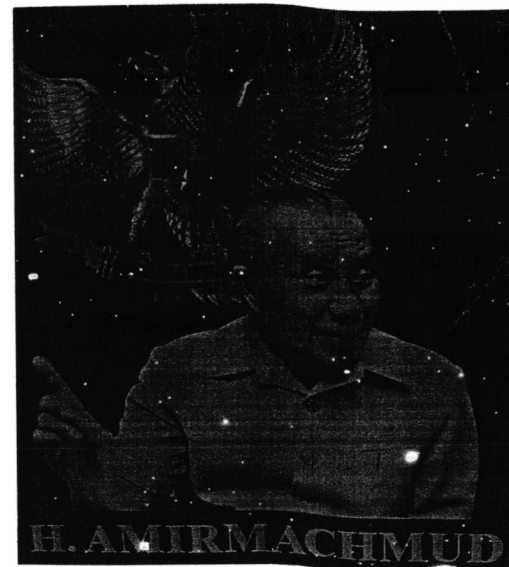
Nah, selepas menerima maket rumah gadang dan memotong galamai, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud kembali duduk bersama para tamu dan undangan. Tidak lama berselang, sang Menteri membacakan Surat Keputusan Nomor 8 tahun 1970 tentang berdirinya Kotamadya Payakumbuh. Selain membacakan surat keputusan berdirinya Payakumbuh, Amir Machmud juga membacakan Surat Keputusan Mendagri Nomor Pemda 7/9-10-313 tanggal 23 Nofember 1970 tentang pengangkatan Drs Soetan Oesman sebagai Pejabat Walikota Payakumbuh.

Selanjutnya, juga dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan bagian wilayah Kabupaten 50 Kota menjadi bagian dari wilayah Kotamadya Payakumbuh. Penandatanganan berita acara dilakukan oleh Bupati 50 Kota A Syahdin dan Pejabat Walikota Drs Soetan Oesman.

Menteri Dalam Negeri Amir Machmud sendiri dalam pidato peresmian mengatakan, peresmian Kotamadya Payakumbuh bukanlah pembentukan kota baru. Bukan pula penukaran yang baru terhadap kota tersebut. Sebab kotamadya ini sebenarnya telah ada dan telah terbentuk bersamaan dengan tiga kota lainnya yaitu

Kota-madya Pekanbaru, Pa-dangpanjang, dan Sawah-lunto, sesuai Undang-Un-dang Nomor 8 tahun 1956.

Hanya saja menurut Amir Machmud, realisasi Kotamadya Payakumbuh sedikit terlambat karena masalah teknis yang timbul kemudian. Meskipun begitu, masyarat bersama aparaturnya harus bisa menggali segenap potensi dan tetap menjaga terwujudnya stabilitas nasional.



Dengan diresmikannya Payakumbuh pada tanggal 17 Desember 1970, berarti penantian panjang masyarakat sejak tahun 1950 atau selama 20 tahun telah berakhir menggembirakan. Walaupun begitu jalan Payakumbuh masih panjang dan jauh! (***)

ZAMAN SOETAN OESMAN



SEHARI setelah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, aktifitas pemerintahan di Kotamadya Payakumbuh mulai menggeliat. Buktinya, pada Jum'at 18 Desember 1970 langsung digelar acara perpisahan antara Kabupaten 50 Kota dengan Kotamadya Payakumbuh.

Acara "*bapailah-batingalah*" ini berlangsung di aula kantor Bupati Limapuluh Kota dan dihadiri berbagai tokoh sipil maupun militer. Dalam

acara juga digelar perkenalan antara para tokoh dengan Drs Soetan Oesman yang ditunjuk sebagai Penguasa Tunggal Payakumbuh dan Drs Djansihar sebagai Sekretaris Daerah.

Sebelum Soetan Oesman dan Djansihar memperkenalkan diri, Ketua Peresmian Kotamadya Payakumbuh A Morel Hamid Datuak Rajo Indo Anso Nan Ratiah diberi kesempatan untuk berpidato. Dalam pidatonya A Morel Hamid berharap kepada Soetan Oesman dan Djansihar agar bisa menjaga amanat rakyat dari 7 nagari.

Mendengar harapan tersebut, Soetan Oesman berjanji akan terus bekerjasama dengan masyarakat. Janji serupa disampaikan pula oleh Drs Djansihar yang menjadi Sekda berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar tanggal 14 Desember 1970 Nomor UP.1078/GSB/1970.

Selepas acara di kantor bupati 50 Kota, Soetan Oesman dan Djansihar memilih beristirahat dan berkenalan lebih dekat dengan sejumlah tokoh masyarakat. Keesokan harinya atau pada Sabtu 19 Desember 1970, baru mereka memulai aktifitas pemerintahan.

Aktifitas dimulai dengan mendatangi Balaikota yang berada di jalan H Agus Salim Nomor 36. Sekarang jalan tersebut bernama jalan Soetan Oesman. Fasilitas yang terdapat di Balaikota pada saat itu sangat terbatas. Jumlah pegawai negeri juga baru 14 orang. Salah satu diantaranya adalah Sahar Ismail Datuak Kakamo yang pindah dari kantor bupati 50 Kota.

Kendati sarana dan fasilitas di Balaikota Payakumbuh sangat terbatas, Soetan Oesman bersama Djansihar dan 14 pegawai tetap bersemangat menjalankan aktifitas pada hari pertama kerja tersebut. Kerja paling awal dilakukan adalah membuat pengumuman kepada khalayak ramai.

Pengumuman Nomor 001/U.1970 yang diteken oleh Drs Soetan Oesman tersebut, menurut Sahar Ismail Datuak Kakamo memiliki dua materi pokok. Pertama memberitahu kepada masyarakat bahwa istilah jabatan pada surat-surat resmi adalah "PD. WALIKOTA/PENGUASA PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA PAYAKUMBUH". Sedangkan kedua memberitahukan kepada khalayak umum jenis stempel yang dipakai pemerintah kota.



■Siapa pernah menyangka, gedung dealer mobil di jalan Soetan Oesman ini pernah menjadi kantor walikotamadya Payakumbuh pertama. Dulu, jalan Soetan Oesman bernama jalan H Agus Salim.

Usai membuat pengumuman, hari-hari berikutnya Pemerintah Kotamadya Payakumbuh dibawah kepemimpinan Soetan Oesman mulai menginventarisir data dan statistik kota. Hasilnya pada awal tahun 1971 jumlah penduduk diketahui berjumlah 63.339 jiwa, dengan perbandingan penduduk laki-laki sebanyak 32.284 jiwa dan perempuan 31.035 jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan terdapat 1.033 warga keturunan dan warga negara asing. Kebanyakan diantara mereka adalah etnis Tionghoa yang telah melewati proses asimilasi cukup lama dengan penduduk asli.

Selain mengetahui jumlah penduduk, pada tahun 1971 itu pemerintahan Soetan Oesman juga sudah menginventarisir jumlah jorong (dusun). Diketahui di Payakumbuh terdapat 72 jorong yang tersebar pada 7 nagari, mulai dari Koto Nan Godang, Koto Nan Ompek, Limbukan, Aia Tabik, Payobasuang, Tiaka sampai Lampasi.

Untuk melayani masyarakat pada 72 jorong tersebut, walikota Soetan Oesman bersama Sekda Djansihar tentu bakal kewalahan.

Makanya mereka mengangkat tiga staf Balaikota menjadi Pembantu Penguasa Pemerintah Daerah. Mereka adalah Muhammad Dian sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Drs Marisna Ma'rifa sebagai Kepala Biro Ekonomi Pembangunan, dan Soetan Anwar Roesin sebagai Kepala Biro Administrasi Umum.

Kemudian Soetan Oesman menunjuk pula seorang Kepala Sub Direktorat Khusus. Jabatan ini dipercayakan kepada Z Datuak Parmato Budi. Dalam menjalankan tugasnya, baik Z Datuak Permato Budi maupun tiga kepala biro dibantu oleh para pegawai yang jumlahnya sudah bertambah dari 14 orang menjadi 36 personel.

PEMILU PERTAMA

Tidak lama berselang, musim pemilihan umum pun datang. Kotamadya Payakumbuh sebagai kota yang baru saja diresmikan tentu harus berperan aktif dalam menyukseskannya. Soetan Oesman merasa bertanggungjawab. Dia mendorong seluruh masyarakat untuk berpartisipasi memberikan hak suara.

Dorongan yang diberikan rupanya cukup berhasil. Bahkan pada tanggal 2 Oktober 1971 melalui Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 104/GSB/1971 sudah diketahui pimpinan dan anggota DPRD Payakumbuh periode 1971-1977. Mereka berjumlah sebanyak 20 orang. Berasal dari Golongan Karya (8 orang), Parmusi (5 orang), ABRI (3 orang), PI Perti (2 orang), PSII (1 orang) dan Non ABRI (1 orang).

Anggota DPRD dari Golongan Karya adalah Kapten (Purn) Danoes, Muslim Habani BA, M Noer Djael Soetan Rajo Malenggang, Nurasi Sani Datuak Madjo Nan Hitam, Martian Satni, M Noer Nasidar BA, Yahya Zakaria, dan Tarmizi Wahid. Sedangkan dari Parmusi adalah M Yanis Akam, Ilmar, Yasmo Said dan Zulhafnizul BA.

Sementara anggota DPRD dari ABRI masing-masing E Suparya Ratna Wijaya, Harun A Rasid, Boesro Krisno. Dari PI Perti M Yoenoos Imam Jalelo dan S Datuak Tumbi Nan Batabiah. Dari PSII Iqral Djadoel dan dari Non Abri diangkat M Sanan Zainal BA.

Begitu terpilih, 20 anggota DPRD tersebut langsung menggelar sidang untuk menetapkan pimpinan defenitif. Sidang pemilihan dipimpin oleh anggota DPRD paling tua yakni Kapten (Purn) Danoes dari Golongan Karya, didampingi anggota termuda Ilmar dari Parmusi.

Sidang akhirnya sepakat menunjuk E Suparya Ratna Wijaya dari ABRI sebagai ketua DPRD defenitif. Dalam tugasnya, E Suparya dibantu oleh dua wakil ketua. Masing-masing Said Ali BCap dari Karya Pembangunan dan M Yanis Akam dari Parmusi.

Beberapa waktu kemudian, pimpinan dan anggota DPRD yang berkantor selama dua tahun di Gedung Gambir, Fakultas Pertanian Unand juga membentuk alat kelengkapan terdiri dari 3 Fraksi, 5 komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, panitia khusus, dan sekretariat. Dalam menjalankan tugas-tugas, alat kelengkapan dewan ini dinilai cukup berhasil.

PARA MUSPIDA

Bersamaan dengan pembentukan DPRD pertama di Kotamadya Payakumbuh pada tahun 1971 tersebut. Sejumlah lembaga pemerintahan lainnya yang disebut Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) juga sudah memiliki pimpinan defenitif. Misalnya saja Kejaksaan Negeri Payakumbuh, saat itu dipimpin oleh Alfian Yunus SH. Sedangkan job Kapolres dijabat AKBP Amad Atmajarawita, Komandan Kodim diemban Letkol Inf Soemardi, Ketua Pengadilan Negeri dipercayakan kepada Rizora Efendi SH dan Kepala Pengadilan Agama dipimpin oleh H Abdullah Ali.

Hanya saja, jabatan Kapolres AKBP Amad Atmajarawita, Komandan Kodim Letkol Inf Soemardi, dan Kepala Kejaksaan Alfian Yunus tidak bertahan lama. Sebab sesuai dengan tradisi yang masih berlaku sampai sekarang, unsur-unsur Muspida tersebut harus terus mengalami mutasi dan rotasi sebagai upaya penyegaran.

Dengan kondisi demikian, maka tidak heran bila semasa Drs Soetan Oesman memimpin Kotamadya Payakumbuh, baik sebagai Walikota Penguasa Tunggal dari tahun 1970 sampai 1973 maupun sebagai walikota defenitif periode 1973-1978, jabatan

Kapolres, Komandan Kodim dan Kepala Kejaksaan, berjalan silih berganti.

Misalnya Kapolres AKBP Amad Atmajarawita yang telah bertugas sejak tahun 1967, digantikan oleh Letkol Pol Drs Pratomo pada tahun 1972-1978. Sedangkan Komandan Kodim Letkol Inf Soemardi yang melaksanakan jabatan dari tahun 1970, digantikan oleh Letkol CZI Kardono pada tahun 1975-1979. Kemudian, Kepala Kejaksaan Alfian Yunus yang mulai tugas tahun 1970, digantikan oleh Slamet SH pada tahun 1972-1973. Selanjutnya, Slamet SH juga digantikan oleh Usman Mahdy SH pada tahun 1973 sampai 1976. Lalu pada tahun 1976 sampai 1980, jabatan Kepala Kejaksaan dipercayakan kepada AM Lubis SH.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Rizora Efendi dan Kepala Pengadilan Agama H Abdullah Ali cukup lama menjabat. Rizora Efendi mulai memimpin tahun 1970 sampai 1976. Berarti enam tahun lamanya ia seiring-sejalan dengan walikota Soetan Oesman. Baru kemudian digantikan oleh Syamsir Adjram SH dari tahun 1976 sampai 1981. Sedangkan H Abdullah Ali memimpin Pengadilan Agama dari tahun 1968 sampai 1978 atau pas saat Soetan Oesman mengakhiri jabatan.

INSTANSI BELUM BANYAK

Pada zaman Soetan Oesman memimpin Kotamadya Payakumbuh dari tahun 1970-1978, jumlah dinas, kantor biro, dan instansi pemerintah belum banyak. Dinas yang pertamakali dibentuk adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dinas ini lahir bersamaan dengan peresmian Kotamadya Payakumbuh tanggal 17 Desember 1970.

Pejabat pertama Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Ramaini. Dia menjabat selama hampir 13 tahun, mulai tahun 1970 sampai 20 Februari 1983. Saat dia memimpin, berbagai program dijalankan terutama yang bersifat penyuluhan. Sayangnya program pertanian yang sifatnya monumental pada era Soetan Oesman belum terlihat.

Dua bulan kemudian atau pada 11 Februari 1971 lahir pula Kantor Departemen Penerangan di Payakumbuh. Dasar pendirinya adalah Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 197/SU/BK/c/1971. Sedangkan peresmianya digelar 26 Maret 1971.

Mula-mula Kantor Departemen Penerangan Payakumbuh dipimpin oleh Pejabat Sementara bernama AN Datuak Rajo Tuo. Selanjutnya baru dipimpin Agus A dari tahun 1971 sampai 1974 dan Azinar Amin dari 1974 sampai 1978.

Tugas yang dilakukan Kantor Departemen Penerangan Payakumbuh semasa itu lebih banyak sebagai 'alat politik' rezim Orde Baru. Diantaranya memonitor berita ataupun bahan penerangan dari pusat dan propinsi untuk disebarluaskan. Kemudian melaksanakan pembinaan penerangan dan melakukan siaran pedesaan lewat RRI.

Selain Kantor Departemen Penerangan, pada tahun 1971 itu di Payakumbuh juga sudah ada Kantor Statistik. Kantor ini lahir atas Keputusan Kepala Biro Pusat Statistik Nomor 568/71/2.1 tanggal 16 Agustus 1971. Keberadaan Kantor Statistik sangat terasa manfaatnya terkait kepentingan data dan angka pada seluruh sektor. Pemimpin Kantor Statistik pertama Payakumbuh adalah Syofian Sori. Dia memimpin dari tahun 1971 sampai 1979.

Bersamaan dengan kehadiran Kantor Departemen Penerangan dan Kantor Statistik Payakumbuh, datanglah Surat Keputusan Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Dati I Sumatera Barat Nomor 25/XIII-a/-1971 tentang pembentukan Dinas Peternakan Kotamadya Payakumbuh. Pejabat yang ditunjuk memimpin dinas ini adalah Syamsoe Achyar. Dia memimpin selama 9 tahun dari tahun 1971 sampai 1980.

Tahun pertama terbentuk Dinas Peternakan belum memiliki banyak program. Jumlah ternak yang dimiliki pemerintah kota hanya 16 ekor. Empat tahun kemudian baru menjadi 29 ekor. Untuk memotivasi peternak pada zaman Soetan Oesman Dinas Peternakan dua kali mengucurkan kredit. Pertama tahun 1972 berupa kredit Pra Bimas ayam ras dan itik. Kedua tahun 1977 berupa kredit sapi Australia Bantuan Presiden (Banpres).

Setahun setelah kehadiran Dinas Peternakan atau dalam dua tahun usia Payakumbuh, walikota Soetan Oesman mulai melihat gejala sosial yang akan terjadi. Untuk itu dia memutuskan membuat Kantor Departemen Sosial. Kantor ini mula-mula dipimpin pertama kali oleh Mazni BZW. Dia memimpin dari tahun 1972 sampai 1975. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan

oleh M Rais Bsc.

Selain telah memiliki Kantor Departemen Sosial, Dinas Peternakan, Kantor Statistik, Kantor Departemen Penerangan dan Dinas Tanaman Pangan. Pada tahun 1971-1972 di Payakumbuh juga sudah memiliki Dinas Pembinaan Bangsa. Dinas ini dipimpin oleh Dahnar Tamin.

Selanjutnya juga telah ditunjuk beberapa kepala seksi dan kepala sub bagian yang bertugas di Balaikota. Mereka diantaranya adalah Kepala Seksi Kesra Sahar Ismail Datuak Kakamo, Kepala Seksi Politik Yunir Yalri, Kepala Seksi Arsip Satar, Kepala Seksi Perlengkapan Roestanizar, dan Kepala Seksi Keamanan Zarlis.

Kemudian, Kepala Seksi Perundangan dan Tata Hukum Yamsasni, Kepala Seksi Keuangan Mustafa, Kepala Seksi Kepegawaian Asril SM BA, Kepala Seksi Perencanaan Pengawasan Meiwarman, Kepala Sub Bagian Administrasi Rabiatur Adawiyah, dan Pengawas Pasar Serikat Syofyan SM.

PILWAKO PERTAMA

Setelah dua tahun menjabat sebagai Walikota Penguasa Tunggal Payakumbuh, tibalah masanya bagi Soetan Oesman mengakhiri masa tugas. Tapi masyarakat masih menghendaki bekas Camat Gambir, Provinsi Jakarta tersebut untuk memimpin mereka. Bagaikan gayung bersambut, keinginan dari masyarakat akhirnya diejawantahkan DPRD dengan menetapkan Soetan Oesman sebagai calon tunggal kepala daerah. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 27/KPTS/DPRD/PYK-1973 tanggal 23 Januari 1973.

Hanya sepekan setelah DPRD menetapkan Soetan Oesman menjadi calon tunggal kepala daerah atau pada tanggal 30 Januari 1973, Gubernur Sumbar lewat surat Keputusan Nomor Desth/01/Rhs-1973 juga menyetujui pencalonan Soetan Oesman sebagai Walikotaamadya Payakumbuh periode 1973-1978.

Dengan adanya persetujuan dari DPRD Kotamadya Payakumbuh dan Gubernur Sumbar, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 Februari 1973 akhirnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor Pemda 7/3/41-68 tentang penetapan Soetan Oesman. Begitu ditetapkan kembali sebagai walikota, Soetan Oesman terus

meletakkan dasar-dasar pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Payakumbuh. Hal itu bisa dibuktikan dengan lahirnya Dinas Kesehatan Payakumbuh pada tanggal 28 Nofember 1973.

Dinas Kesehatan lahir tanpa dasar hukum. Baru sembilan tahun muncul Perda Nomor 04/1982 tentang pembentukan Dinas Kesehatan. Kendati demikian, upaya Soetan Oesman diyakini sangatlah tepat. Sebab kesehatan merupakan hak azazi manusia. Pemerintah tentu harus mengurus sektor ini.

Mula-mula dibentuk, Dinas Kesehatan dipimpin dr M Nazir. Kantornya berada di kantor Agraria sekarang jalan Arisun, Kelurahan Nunang. Saat dr M Nazir menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Payakumbuh dari tahun 1973 sampai 1975, berbagai program dapat terlaksana dengan baik.

Bahkan pada tahun pertama itu juga berhasil didirikan Puskemas Ibuah. Pendirian Puskesmas Ibuah nyaris bersamaan dengan prestasi Ibuah sebagai jorong terbaik di Sumatera Barat pada tahun 1970-an tersebut. Setelah dr M Nazir mengakhiri tugas, jabatan Dinas Kesehatan Kotamadya Payakumbuh dipercayakan walikota Soetan Oesman kepada dr Nazif Manaf.



■ Walikotaamadya Payakumbuh Soetan Oesman bersama tokoh masyarakat saat pembangunan Jorong Ibuah. Jorong ini pernah menjadi jorong terbaik di Sumatera Barat.

Setelah pembentukan Dinas Kesehatan, Soetan Oesman kembali membuat terobosan bagi Kotamadya Payakumbuh dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah. Dinas ini berdiri tanggal 31 Mei 1975 melalui Nota Penunjukan Walikotamadya Payakumbuh Nomor UP.49/ND/75 kepada Seksi Pendapatan dan Pengawasan Yunir Yalri BA.

Kehadiran Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 1975 menurut Yunir Yalri juga sesuai dengan kehendak UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa suatu daerah harus berusaha menggali, mengembangkan kemampuan dan potensi daerahnya, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Payakumbuh Nomor 236/WK-PYK/1975 tertanggal 17 Desember 1975, maka struktur Dinas Pendapatan Daerah yang baru dibentuk nampaknya cukup ramping. Untung jabatan kepala dinas dipercayakan kepada Syofyan SM.

Sedangkan wakil kepala dinas diamanahkan kepada Yunir Yalri BA, Sub Bagian PersepsiKas diemban Datuak Tongga, Sub Bagian Pajak Langsung/Tidak Langsung dipercayakan kepada Januar Datuak dan Surani, Sub Bagian Retrtibusi dan lain-lain Pendapatan dijabat Arsyad Saidanir dan Rustanizar, serta Sub Bagian Tata Laksana Pendapat diemban rangkap oleh Yunir Yalri dengan dibantu Nahar Nazar.

Menurut data yang ada dalam Buku 20 Tahun Kotamadya Payakumbuh, sejak Dinas Pendapatan Daerah dibentuk tahun 1975, jumlah PAD Payakumbuh mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika tahun 1972/1973 berjumlah sekitar Rp22,5 juta, tahun 1973/1974 berjumlah Rp3,6 juta, tahun 1974-1975 sebanyak Rp10,1 juta. Maka pada tahun 1975/1976 meningkat menjadi Rp24,9 juta lebih.

Peningkatan itu terjadi berlangsung terus-menerus pada tahun berikutnya. Misalnya saja tahun 1976/1977, pendapatan asli daerah Payakumbuh berjumlah sebanyak Rp43,3 juta lebih. Ini dapat dipertahankan pada tahun 1977/1978 dan 1978/1979 atau penghujung masa jabatan Soetan Oesman.

Selain membuat Dinas Pendapatan Daerah, Soetan Oesman dalam periode kedua memimpin Payakumbuh juga mendorong lahirnya Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kantor ini lahir pada tanggal 30 Juni 1975 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0188/c/1975.

Mula-mula terbentuk, Kantor Departemen Pendidikan Payakumbuh masih digabungkan dengan Kabupaten Limapuluh Kota. Baru tiga tahun kemudian atau 1978, Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Payakumbuh berdiri sendiri dengan dipimpin oleh Muchtar Efendi.

Kemudian, lahir pula Kantor Departemen Agama di Payakumbuh pada tanggal 30 Januari 1974. Kantor ini lahir dengan berdasar kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974. Awal didirikan atau pada zaman walikota Soetan Oesman, Depag dipimpin seorang pejabat bernama Baharudin Buyung.

PDAM LAHIR, PASAR BELUM DIURUS

Selain membentuk sejumlah dinas, kantor, biro dan menunjuk kepala seksi, Pemerintah Kotamadya Payakumbuh dibawah pemerintah Soetan Oesman juga menggagas kehadiran Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).

Sekedar diketahui saja, saat Soetan Oesman menjadi walikota, pasokan air bersih untuk kawasan pusat kota memang sedikit susah. Bahkan, sebagaimana keterangan Drs Soetan Muhammad Taufik Thaib, keponakan kandung sekaligus menantu Soetan Oesman yang menjalani masa kecil dan remaja di Payakumbuh, pasokan air bersih tidak hanya susah tapi sama sekali tidak tersedia. Sehingga membuat keluarga Soetan Oesman sendiri sebagai walikota, terpaksa mengontrak salah satu rumah warga di nagari Koto Nan Godang.

Proyek pembangunan air minum Payakumbuh sendiri dimulai Soetan Oesman pada tahun 1975 dan 1976 dengan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Saat pembangunan berlangsung, Soetan Oesman meninjau langsung ke lapangan. Bahkan dia pula yang turun meminta air kepada

masyarakat sekitar Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota.

Hanya saja, proyek air minum yang dirancang Soetan Oesman tidak dapat diselesaikan sampai jabatannya berakhir pada tahun 1978. Baru sekitar sebelas tahun kemudian proyek itu dinyatakan rampung. Kendati demikian, Soetan Oesman terbukti memiliki jasa besar dalam proses kelahiran PDAM Kota Payakumbuh.

Dari persoalan air, kita pindah kepada persoalan pasar. Saat zaman Soetan Oesman memimpin Kotamadya Payakumbuh, pasar yang bernama Pasar Serikat itu diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten 50 Kota. Serah terima dilakukan tanggal 17 Februari 1971 dengan dasar hukum Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 18/GSB/1971.

Sejak diserahkan pengelolanya kepada Kotamadya Payakumbuh, kondisi pasar serikat cenderung belum mengalami perubahan. Barang dagangan masih digelar pada kios-kios dan los-los yang sifatnya belum permanen. Baru pada tahun 1976 atau dua tahun menjelang akhir jabatan Soetan Oesman dibangun Pasar Inpres Bagian Timur. Setahun kemudian atau tahun 1977/1978 dibangun Perkiosan atau Los Inpres.

KOMUNIKASI DAN BANK

Nah, jika tadi sudah dikupas segala upaya yang dilakukan Soetan Oesman dalam menjalankan roda pemerintah di Kotamadya Payakumbuh dari tahun 1973 sampai 1978. Maka sekarang tentu perlu juga diketahui bagaimana kondisi komunikasi publik dan dunia perbankan pada zaman tersebut.

Usut punya usut ternyata kedua sektor ini sudah cukup maju di Payakumbuh. Bahkan, Kantor Pos dan Giro sudah ada sejak tahun 1960. Pimpinan pertamanya adalah Said Ali BC AP. Dia memimpin dari tanggal 1 Juni 1960 sampai 4 April 1974. Setelah itu baru digantikan oleh Z Datuak Kuniang Nan Batua BC AP mulai tanggal 5 April 1974 sampai 30 Nofember 1980.

Sedangkan Kantor Cabang Transmigrasi Telegrap dan Telepon hadir di Payakumbuh sekitar tahun 1970. Waktu itu yang dilayani baru telepon manual. Pemimpinnya pada periode 1970 sampai

1977 bernama A Rivai. Telepon yang memang masih telepon jaman dahoeloe.

Adapun Kantor Pegadaian untuk membantu kesulitan warga diperkirakan hadir sejak tahun 1966, dengan pimpinan pertama bernama Abbas. Dia kemudian digantikan oleh seorang bernama A Mulik pada tahun 1975 sampai 7 Agustus 1979.

Sementara sarana perbankan sudah hadir di Payakumbuh sejak zaman awal-awal kemerdekaan Indonesia. Bank yang pertama hadir adalah Bank Nasional pada tahun 1965. Setelah itu baru hadir Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada 25 September 1965 dan BNI 1946 pada tanggal 7 Nofember 1965. Kehadiran ketiga bank cukup berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menyusul kehadiran ketiga bank, pada tanggal 11 Juli 1970 atau sekitar lima tahun kemudian, Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga mendirikan cabang di Payakumbuh. Dengan demikian terdapat 4 bank saat Soetan Oesman memimpin Ranah Galamai.

PEMILU KEDUA 1977

Setahun menjelang masa jabatan Soetan Oesman sebagai Walikota Kotamadya Payakumbuh berakhir, pesta demokrasi berupa Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) kembali hadir ke tengah-tengah masyarakat. Pemilu digelar tanggal 22 Mei 1977. Ada tiga partai politik yang menjadi kontestan pemilu.

Ketiganya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari empat partai politik Islam yaitu Parmusi, PSSI, PI Perti dan NU. Kemua, Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai gabungan dari PNI, IPKI dan Murba yang cikal-bakalnya digagas oleh Ibrahim Datuak Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia asal Pandamgadang, Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota.

Setelah pemilihan umum digelar, Golongan Karya dinyatakan mendulang suara terbanyak. Perolehan sura partai politik pendukung orde baru ini di Kotamadya Payakumbuh mencapai

16.718 suara (52,20 persen). Disusul kemudian oleh PPP 14.006 suara (43,73 persen) dan PDI 320 suara (4,07 persen).

Dengan hasil tersebut, ditetapkanlah anggota DPRD Payakumbuh periode 1977-1982. Komposisinya terdiri dari Golkar sebanyak 9 orang, PPP 7 orang, dan dari unsur ABRI 4 orang. Mereka yang berasal dari Golkar adalah Anas Rauf Datuak Rajo Dirajo, Hawadis, Jayusman, Drs Martius Asyadi, M Noer Jaul, Nursai Sani Datuak Nan Hitam, Suhartik, Upik Jalaludin SH, dan Yahya Zakaria.

Sedangkan anggota DPRD dari PPP ialah Azirla Soetan Malano, Bulkaini RM, H Chazanatul Israr, M Yunus Imam Jolelo, Mansyur Arsyad, Nahar Rauh Datuak Pobo, dan Yasni Said. Sementara dari ABRI ditunjuk Muhammad Dian, Soewarno, Adnan, dan Kamsari Malik.

Setelah dilantik, DPRD Payakumbuh periode 1977-1982 yang sudah berkantor di jalan Soekarno Hatta Bulakan Balai Kandi, Nagari Koto Nan Ompek (pas dekat lokasi kantor sekarang) menggelar rapat untuk memilih ketua dan wakil ketua. Hasil rapat ditetapkan Muhammad Dian dari Fraksi ABRI sebagai ketua. Dia didampingi oleh Soewarno dari ABRI sebagai wakil ketua dan Mansyur Arsyad dari PPP sebagai wakil ketua.

PELETAK DASAR

Kembali kepada kepemimpinan Soetan Oesman sebagai menjadi walikota Payakumbuh tahun 1970-1978, dia dikenal sebagai sosok yang cukup berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan pembangunan. Apalagi jika dibandingkan dengan fasilitas yang ada pada zaman tersebut.

Soetan Oesman dengan ditopang oleh para staf yang handal juga berhasil membuat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Payakumbuh mencapai Rp148,3 juta lebih pada tahun 1972/1973. Walau mengalami penurunan pada tahun 1973/1974 menjadi Rp31,9 juta dan Rp41,9 juta pada tahun 1974/1975. Tetapi dapat dinaikkan kembali menjadi Rp104,1 juta pada tahun 1975/1976, dan Rp155,1 juta pada tahun 1976/1977.

Adapun tahun terakhir kepemimpinan Soetan Oesman atau pada tahun 1977/1978, jumlah APBD Payakumbuh juga meloncat

menjadi Rp187,1 juta lebih. Lonjakan ini dinilai cukup fantastis, terlebih saat mengingat uang Payakumbuh pada tahun pertama diresmikan sebagai Kotamadya yang tak lebih dari Rp15 juta.

Sehingga tidak heran, sampai Soetan Oesman meletakkan jabatan pada tanggal 24 Juni 1978, banyak masyarakat Payakumbuh yang sedih dibuatnya. Mereka seakan tak rela melepas Soetan Oesman. Tapi apalah daya, sang pemimpin sudah dua periode melaksanakan amanah. Ketentuan Undang-Undang tak memungkinkan lagi baginya untuk melanjutkan jabatan. *Lantas, bagaimana perkembangan Payakumbuh semenjak ditinggalkan Soetan Oesman? Siapakah yang menjadi penggantinya? Simak lebih lanjut! (***)*

Namun perlu diingat, sebelum pembatasan fungsi kota dilakukan, pemerintah dalam setiap program dan kegiatan harus tetap mengacu kepada peruntukkan wilayah. Perhatikan betul Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hindari pemanfaatan kawasan hutan lindung atau lahan konservasi. Sebab tidak jarang terjadi, bukit – bukit yang diratakan untuk kepentingan pembangunan, sarana industri, perdagangan ataupun perumahan, malah mengundang munculnya bencana alam.

Selain mengacu kepada peruntukkan wilayah, pembatasan fungsi kota juga harus ditunggangi semangat otonomi daerah di Indonesia. Artinya, pembatasan fungsi meski bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, sekaligus mempercepat penyebaran pembangunan.

Demikianlah harapan saya untuk Payakumbuh masa mendatang. Semoga Allah SWT akan meridhoi kita semua. Meridhoi warga Payakumbuh. Meridhoi Sumatera Barat. Meridhoi Indonesia. Dirgahayu Payakumbuh! (Bintaro, 14 November 2010)

Pembangunan Agama: Dulu, Kini dan Esok

Oleh:

DR H Syar'i Bin Sumin MA*



DAHULU kita belum punya, tapi serasa mendapat. Sekarang kita sudah punya, namun serasa kehilangan. Dahulu sarana penunjang pendidikan Kota Payakumbuh tidak selengkap sekarang, namun dapat melahirkan tokoh-tokoh ulama dan kaum intelektual yang penuh dengan keteladanan dan menjadi insan panutan.

Masing-masing mereka memiliki lembaga pendidikan yang kokoh dengan jumlah murid yang tidak sedikit. Sebut saja Syeikh Haji

Muchtar Angku Lakung dengan MTI-nya di Koto Panjang

*Walikota Payakumbuh Periode 1988 – 1993

Lamposi, Buya Haji Arius Syaikhi dengan Mahad Islami-nya di Koto Nan Ompek, dan Buya Haji Ruslan dengan MTI-nya di Limbukan.

Kemudian, ada pula Buya Haji Rasyid Taher dengan Majelis Taklim-nya di Perambahan, Buya Haji Damrah dengan Al Manar-nya di Batuhampar, Haji Israr dengan TC dan Islamic Collage di Payakumbuh, Buya Haji Muhammad Ramli dengan Surau-nya di Simalanggang, dan Buya Haji Malik dengan Mahad Quran-nya di Batuhampar Payakumbuh,

Mereka semua telah melahirkan para pengemban dan pengayom Alquran (Hamalat Alquran) yang brilian dan berkualitas tinggi. Misalnya saja Buya Haji Malik, punya banyak murid-murid. Salah satunya bernama Ustadz Muhammad Thoyyib.

Ustadz ini kebetulan adalah mamak (paman) kandung saya. Beliau terbilang ahli dalam ilmu Alqur'an. Bukannya bermaksud '*mangapik-ngapik daun kunik*' atau membanggakan diri sendiri, tapi memang begitulah nyatanya. Saya sendiri bisa mempelajari Al-Qur'an, setelah berguru kepada beliau. Tak hanya sampai khatam Alquran, saya juga berkesempatan mempelajari 7 macam perbedaan bacaan Alquran (Qiraat Sab'ah).

Kini, mencari ustadz seperti Muhammad Toyyib, apalagi mencari ulama sekaliber Buya Haji Malik, Buya Rasyid Taher, Buya Haji Damrah, Syeikh Muchtar Angku Lakung, Buya Ruslan dan lainnya itu, sungguh sangatlah payah di Payakumbuh. Bilapun ada, jumlahnya tidaklah berapa.

Selain susah mencari ulama, kita dihadapkan pada persoalan susah mencari sosok berakhlakul Alquran. Kalau dahulu di Payakumbuh belum ada Qari-Qariah yang berprestasi dan bertaraf Nasional dan Internasional seperti sekarang. Tapi kita tidak pernah mendengarkan akhlak mereka bertentangan dengan akhlakul Quran. Tapi sekarang?

Dahulu, belum ada wadah pemersatu seperti sekarang ini, antara lain seperti Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafizh-Hafizhah (IPQAH) mulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Nasional. Namun ukhuwah Quraniyah serta silaturahmi mereka sangat akrab, indah, ikhlas dan harmonis. Kalau sekarang?

JANGAN MENYERAH

Kendati demikian, Payakumbuh tidak boleh menyerah. Tekad membangkit batang tarandam dalam bidang keagamaan harus terus didengarkan. Walau berat tapi ini bisa dilakukan. Apalagi Payakumbuh dalam usia 40 tahun sudah mengalami banyak perubahan.

Kesejahteraan masyarakat mulai telah tercipta, seiring perkembangan perekonomian yang semakin membaik. Pemimpin-pemimpinnya juga sudah memperlihatkan keteladanan atau menjadi panutan. Sudah terasa pula keseimbangan semangat dan syiar denyut Nur Islam dengan pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan. Terutama institusi perguruan tinggi yang akan mencetak insan-insan Hamalatul Quran dan intelektual muslim yang bernaung dibawah panji-panji Qurani dan semerbaknya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Iklim kebangkitan keseimbangan Iptek dan Imtaq di Payakumbuh, selain dapat dilihat dari kehadiran Universitas Andalas (Unand) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Quran (STAIDA) yang diresmikan Gubernur Sumatera Barat 2 November 2010. Juga dapat dirasakan ketika Pemerintah kota Payakumbuh bersama masyarakatnya, memprioritaskan pembangunan di sektor agama, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga kenyamanan hati menempati bumi Payakumbuh lebih terasa, selain dikarenakan letaknya yang strategis.

Disamping menyeimbangkan Iptek dan Imtaq, Pemerintah Payakumbuh juga terlihat mulai serius memajukan kegiatan kaum ibu dengan meningkatkan silaturahmi dan persatuan, mensyiarkan ajaran Islam melalui kelompok-kelompok Majelis Taklim dan jamaah yasin.

Terdapat pula peningkatan kesejahteraan guru-guru agama, TPA/TPSA dan para Hamalatul Quran lainnya. Ditambah keberhasilan putra-putri terbaik Payakumbuh mencapai prestasi dalam even MTQ Nasional ataupun Internasional.

Hanya saja, upaya *membangkit batang tarandam* itu belum optimal. Segala fasilitas dan dukungan pemerintah belum diberdayakan dengan maksimal. Sehingga cita-cita besar menjadikan Payakumbuh tidak hanya berpendidikan, tapi juga

berbudaya dan berakhlak mulia, masih harus dikejar pada masa mendatang.

Makanya, kita himbau segenap masyarakat Payakumbuhlah kembali kepada tuntunan Alquran sebagai bacaan, ajaran, amalan, panutan dan sumber kepribadian. Kemudian, masyarakat juga harus mempertahankan dan mendukung pemimpin yang sarat dengan sifat-sifat teladan, guna mencapai *Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*, negeri yang aman dan makmur dibawah naungan Allah yang Maha Pengampun.

Sedangkan kepada para pemimpin Payakumbuh, kita senantiasa berharap, agar dapat mempedomani tiga faktor Rasulullah Muhammad dalam membangun umat. Masing-masing faktor kepribadiannya, faktor kebenaran ajaran yang dibawanya dan faktor mukjizat Alquran.

Pedomani jua tuntunan Umar bin Abdul Aziz, Harun Al Rasyid dan Al Makmun (pada masa kejayaan peradaban Islam di waktu lalu) dengan memelihara dan mengamalkan tuntunan Alquran. Berhati-hati dan berpandai-pandai membelanjakan uang Negara semata-mata untuk kemaslahatan bangsa, membangun ekonomi, pendidikan dan keamanan. (***)

Berharap Sinergisitas Payakumbuh dan Limapuluh Kota

Oleh:

Drs H Azmi Syahbuddin*



WAKTU terus berputar, musim terus berganti. Tidak terasa, 40 tahun sudah Payakumbuh berdiri sebagai sebuah kota. Dalam kurun 40 tahun itupulah para perantau menyimpan banyak keinginan di hati masing-masing. Salah satunya, kita ingin Payakumbuh bersinergi dengan Kabupaten Limapuluh Kota.

Mengapa demikian? Sebab, semenjak Payakumbuh berpisah dari Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 17 Desember 1970, hubungan kedua daerah bagaikan pepatah Minang *sarumah balain*

raso, sasampan indak sagamang, sabanta indak sarasian (satu rumah berlain rasa, satu sampan tidak segamang, satu bantal berlain). Masing-masing 'sibuk' dengan kemajuan daerahnya, bahkan terkesan berlomba-lomba. Akibatnya, kata sinergi menjadi suatu yang gampang diucapkan, tetapi sulit untuk diwujudkan.

Padahal jika ditelusuri asal-usul Payakumbuh dan Limapuluh Kota sama. Berada dalam satu rumpun yang sama. Memiliki budaya yang serupa. Berteduh di bawah payung yang sama. Keduanya tergabung dalam Luak Limopuluah Koto. Keduanya adalah bersaudara. Tapi entah mengapa, kini semua terasa berbeda. Mungkin saja warga kabupaten dan kota di Luak Nan Bungsu itu lupa dengan silsilah kekerabatan mereka. Sehingga tak saling menyapa, seakan sudah menjadi biasa.

Makanya, kita sebagai anak nagari di perantauan mencoba mengingatkan kembali, agar Payakumbuh dan Limapuluh Kota dapat bersatu. Walau situasi tidak lagi seperti dulu. Walau terpisah secara administrasi pemerintahan, tapi kebersamaan dua daerah harus tetap dijaga.

Momen 40 tahun Payakumbuh ini, barangkali sangat tepat dijadikan sebagai langkah awal membangun kembali kebersamaan tersebut. Perhatikanlah kepada seluruh warga Sumatera Barat, bahwa Payakumbuh dan Limapuluh Kota bisa seayun selangkah. Tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita sanggup bahu-membahu. Kita mampu bantu-membantu. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Kita sehinia, kita semalu. Kita senasib, kita sepenanggungan.

Untuk itu, tiada pilihan lagi, rekatlah tali persaudaraan yang hampir putus atau mungkin sudah putus. Mulai masa mendatang, Payakumbuh dan Limapuluh Kota harus saling bekerjasama. Kedua daerah meski bersinergi dalam hal apapun. Sehingga kemajuan Payakumbuh menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Limapuluh Kota. Kebahagiaan Payakumbuh juga dapat dirasakan oleh Limapuluh Kota. Begitu pula sebaliknya.

MULAI DARI PERBATASAN

Mungkin ada pihak-pihak yang pesimis, sinergisitas antara Payakumbuh dengan Limapuluh Kota susah untuk diwujudkan. Tapi kita sebagai anak nagari di perantauan haqqul yakin, semuanya bisa dilakukan. Bermodal latar belakang yang sama, ditambah tujuan yang sama menuju perubahan besar ke arah yang lebih baik, sinergisitas kedua daerah pasti dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pada tahap awal, kebersamaan agaknya bisa dimulai Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, dengan sama-sama membangun daerah perbatasan. Jika setiap daerah perbatasan sama-sama dibangun, Payakumbuh dan Limapuluh Kota pasti sama berkembang.

Lain halnya jika hanya Payakumbuh yang membangun daerah perbatasan, tanpa dibarengi Limapuluh Kota, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tak akan menarik perhatian siapapun juga. Atau guna memperjelas batas wilayah bagi pengunjung kedua daerah, sebaiknya kedua daerah bekerjasama membangun plang perbatasan.

Selain bisa memulai kebersamaan dengan sama-sama membangun daerah perbatasan, kerjasama Payakumbuh dan Limapuluh Kota bisa diterapkan pula dalam bentuk dukungan terhadap pembangunan *Landmark* Luhak Limopuluah.

Banyak suara anak rantau mengemukakan, sangat antusias dengan pembangunan *Landmark* Luak Limopuluah yang menurut rencana akan dibangun di tengah-tengah Kota Payakumbuh atau di atas tanah bangunan kantor bupati lama. Menurut perantau, pembangunan kawasan hijau sebagai paru-paru kota itu merupakan lambang persatuan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Bagaimana tidak, *landmark* yang akan dilengkapi dengan fasilitas panggung untuk pementasan seni tersebut, memungkinkan digelarnya berbagai event akbar yang akan dinikmati oleh masyarakat kedua daerah. Sungguh Cara tepat membuka komunikasi dua daerah dan memperkuat persatuan diantaranya.

Selain itu, *landmark* dapat menjadi sumber pendapatan, karena logikanya semakin banyak orang yang datang, peredaran uang akan

semakin banyak pula. Wisata kuliner tentunya akan makin berserakan di sana.

Makanya, sebagai Ketua Badan Kordinasi (Bakor) perantau Luhak Limopuluah di Jakarta saya berpendapat, tak ada salahnya jika pembangunan *landmark* Luhak Limapuluah diwujudkan. Terlebih lagi jika terdapat kesepakatan dua daerah mengenai saling mengisi acara dan berbagi hasil nantinya. Rasanya tidak akan ada persoalan. Tapi sekali lagi, semua ini tentu membutuhkan kebersamaan. Hilangkanlah ego masing-masing pemerintah daerah. Renungkan kembali yang terbaik bagi masyarakat. Ikhlas berbuat demi kemajuan bersama.

Terakhir, menjelang tulisan ini ditutup, sebagai perantau yang sangat cinta dengan Luhak Limopuluah Kota, izinkan kami memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Kami melihat, memasuki 40 tahun usia Payakumbuh telah banyak perubahan di kota Batiah itu. Perkembangan Payakumbuh, terutama pembangunan fisik, dapat dilihat dengan kasat mata.

Walau demikian, sebaiknya rancangan pembangunan kota dibakukan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang bisa menjadi acuan bagi pemimpin-pemimpin masa mendatang. Sehingga tak ada lagi ide-ide pemimpin terdahulu yang menjadi kenangan. Tak ada lagi bangunan terbengkalai karena walikotanya telah berganti. Semoga! (***)

**Drs H Azmi Syahbuddin adalah Ketua Badan Koordinasi (Bakor) Perantau Payakumbuh/Limapuluh Kota. Kini, menetap di Jakarta dan menekuni sejumlah bisnis.*

PYAKUMBUH KOTAKU

Oleh: Yulfian Azrial

*nafas Gunung Sago mengelus kekasihnya penuh cinta,
Si Bungsu tersipu di kejauhan,
di Ngalau Indah, stalagnit dan stalagtit, menjadi sejarah peradaban*

*derap langkah kuda di Kubu Gadang,
leliku jalanan Kelok Sembilan,
belantara Manggani dan Halaban,
sejak dulu mewarnai denyut nadi kehidupanmu*

*Payakumbuh Kotaku,
Gemah ripah bumimu, ramah tamah wargamu,
dalam gebalau zaman yang kian edan, tetaplal kau pada pribadimu*

*selama ini Gunung Sago tak pernah marah, tak pernah muntah,
dengan penuh wibawa ia berdiri gagah, bangga mendampingi kekasihnya,
jangan kecewakan dia,*

*jangan silau hanya karena khayalan,
jangan terpukau hanya karena dongengan,
jangan terlena dengan bujuk-rayu usahawan
jangan tertipu dengan slogan pembangunan*

*kegiatan memang perlu sarat,
tapi janganlah sibuk karenanya,
pembangunan memang perlu cepat,
tapi jangan tergesa-gesa
Payakumbuh Kotaku,
tetaplal arif membaca kenyataan,
tetaplal jeli merapal hitungan,
tetaplal bijak menanggapi tawaran,*

*tetaplah tafakur pada Tuhan,
tetaplah Qur'an jadi pegangan
Payakumbuh Kotaku,
bumimu subur,
bumi sejarah yang melahirkan beribu pahlawan,
bumi sejarah yang membesarkan beribu cendekiawan,
bumi sejarah yang mendewasakan beribu sastrawan,
Payakumbuh kotaku, bumimu subur,
bumi sejarah yang menjadi tumpuan beribu harapan.*

Kreta Nusantara, 92-02



* Yum A.Z adalah nama panggilan akrab Yulfian Azrial, banyak dipakai untuk tulisan-tulisan sastra sejak awal tahun 1980-an.

DAFTAR PUSAKA

- Sikumbang, Thamrin dkk
1990 20 Tahun Kotamadya TK II Payakumbuh
Payakumbuh: Pemko Payakumbuh.
- ISRAR, HC dll
1995 25 Tahun Kotamadya Payakumbuh
Payakumbuh: Pemko Payakumbuh.
- Muchtar, Muzahar
2002 Autobiografi Mengabdikan Untuk Bangsa
Payakumbuh: Koleksi Keluarga.
- Muhammad, Syahrir
2002 DR H Darlis Ilyas SH
Dibawah Dukungan Rakyat
Pemikiran & Langkah Reformasi Sang Walikota,
Jakarta: Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan.
- Muchtar, Muchtiar
2007 Otobiografi Ikhlas Dalam Pengabdian
Padang: Koleksi Pribadi.
- ISRAR, Hikmat
2009 Nan Taserak
Bandung:
- Saipul
2009 Menelusuri Hari Jadi Kabupaten Limapuluh Kota
Limapuluh Kota: Kantor Perpustakaan & Arsip Limapuluh Kota.
- Datuak Panjang Simulie, H.K.R
2010 Acta Diurna
Payakumbuh: Koleksi Keluarga.
- Widarta, I
2001 Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.

Rasyid, Ryaas dll

2002 Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2007 Makna Pemerintahan:
Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan
Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Solihin, Dadang dll

2001 Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jakarta: Gramedia Pustakaka Utama.

Kuntowijoyo

1994 Demokrasi dan Budaya Birokrasi,
Yogyakarta: Bentang.

Dhakidae, Daniel

2001 Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid I
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

2002 Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid III
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

2003 Profil Daerah Kabupaten dan Kota Jilid III
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Pide, Mustari Andi

1999 Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI
Jakarta: Gaya Media Pratama.

Osborne, David

1996 Mewirauahakan Birokrasi
Jakarta: Teruna Graficia

PENELITIAN & MEDIA MASSA

1. Siti Nur Solecha, Konflik Politik pada Penyelenggaraan Pilkada (Studi Kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh)
2. Harian Umum HALUAN (Beberapa edisi dalam kurun 1970-2010)
3. Harian Umum Independen SINGGALANG (Beberapa edisi dalam kurun tahun 1980-2010)
4. KOMPAS (Beberapa edisi dalam kurun tahun 2001-2010)

5. Majalah TEMPO (Beberapa edisi tahun 2001, 2010)
6. Liputan6 SCTV 22 September 2001
6. Media Indonesia (Beberapa edisi tahun 2001-2002)
7. Kantor Berita Antara (Beberapa berita 2001)
8. Harian Mimbar Minang (Beberapa edisi tahun 2001)
9. Harian Pagi POSMETRO PADANG (Beberapa edisi tahun dalam tahun 2007-2009)
10. Harian Pagi Padang Ekspres (Beberapa edisi dalam tahun 2001-2010).
11. Mingguan Rakyat Mandiri (Beberapa Edisi tahun 2001-2002)
12. Tabloid Ummat Surau (Beberapa Edisi)

NARASUMBER & WAWANCARA.

1. Sutan Muhammad Taufik Thaib Daulat Yang Dipertuan Rajo Alam Pagaruyuang, keponakan Drs Sutan Oesman, Walikota Payakumbuh 1970-1978. Sutan Muhammad Taufik Thaib dihubungi di Tigo Batua, Kabupaten Tanahdatar, Oktober 2010.
2. Dra H Putri Reno Rahmah Oesman, putri Drs Soetan Oesman, Walikota Payakumbuh 1970-1978. Puti Reno dihubungi di Tigo Batua, Kabupaten Tanahdatar, Oktober 2010.
3. Fatma Etma Bachtiar, puteri Bachtiar Datuak Pado Penghulu, mantan Bupati Pelalawan Sungai Kerinci, Walikota Padang dan salah satu tokoh perintis lahirnya Kotamadya Payakumbuh. Fatma Etma Bachtiar diwawancarai bersama putranya Rothman Silitonga di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Oktober 2010.
4. Drs Maulia Rozadi, putera pertama Drs Muzahar Muchtar Datuak Siri Marajo, Walikota Payakumbuh 1978-1983. Maulia Rozadi ditemui di perumahan Balai Nan Duo, Koto Nan Ompek, Kecamatan Payakumbuh Barat.
5. Drs H Masri MS, Walikota Payakumbuh 1978-1983, wawancara by phone dan tertulis, dalam rentang Oktober sampai Desember 2010.
6. Drs H Muchtiar Muchtar, Walikota Payakumbuh 1988-1993, wawancara by phone dan tertulis, November 2010.
7. Drs H Fahmi Rasyad, Walikota Payakumbuh 1993-1998, ditemui di Kota Payakumbuh dan Nagari Talang Maua, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, Oktober-Desember 2010.
8. Ir H Benny Muchtar MM, Wakil Walikota Payakumbuh 2002-2005, ditemui di Payakumbuh, November 2010.
9. Drs Yunir Yalri, birokrat senior di Kota Payakumbuh, dihubungi dalam sejumlah kesempatan di Kota Payakumbuh, Oktober-Desember 2010.

10. Sahar Ismail Datuak Kakomo, bekas Panitia Peresmian Kotamadya Payakumbuh 1970 dan pegawai pertama Balaikota Payakumbuh. Dihubungi melalui anaknya wartawan POSMETRO PADANG untuk Payakumbuh Nur Akmal, Oktober-Desember 2003
11. Capt H Josrizal Zain SE MM, Walikota Payakumbuh 2002-2007 & 2007-2012. Dihubungi melalui beberapa kali wawancara di Koto Baru Payobasuang dan rumah dinas Walikota Payakumbuh, Jalan Rangkyo Rasuna Said, Oktober-Desember 2010.
12. Drs AKBP (Purn) Syamsul Bahri Datuak Bandaro Putih, Wakil Walikota Payakumbuh 2007-2012. Dihubungi melalui beberapa kali wawancara formal dan informal di Payakumbuh, Oktober-Desember 2010.
13. Drs H Irwandi Datuak Batujuah, Sekretaris Kota Payakumbuh, dihubungi dalam beberapa kali wawancara di Payakumbuh, Oktober-Desember 2010.
14. Drs Richard Moesa, Asisten I Setdako Payakumbuh.
15. H Ennaldi Datuak Angguang, Kepala DPKD Payakumbuh.
16. Yoherman Ssos, Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Payakumbuh.
17. dr Merry Yuliesday, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.
18. Drs Edvianus, Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh.
19. Para Camat & Sejumlah Kepala OPD/SKPD di Payakumbuh.

PARA PENYUMBANG NASKAH

1. Riza Pahlevi, anggota DPD RI 2009-2014.
2. Azmi Syahbuddin, Ketua Bakor Payakumbuh/Limapuluh Kota di Jabodetabek.
3. Syar'i Bin Sumin, Ketua STAID Payakumbuh.
4. Jhon Kennedy, Kepala Bagian Humas Pemko Payakumbuh 2010.
5. Multia Qairanni, staf Bagian Humas Pemko Payakumbuh.
6. Suhedri Busli, staf Bagian Humas Pemko Payakumbuh

TENTANG PENULIS & EDITOR



FAJAR RILLAH VESKY

Adalah wartawan Harian Pagi *Padang Ekspres* (*Jawa Pos News Network*) dan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pernah meraih penghargaan sebagai penulis buku dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat) 2010, *Rida Award* 2008-2010, Balai Bahasa Padang 2004 dan Dewan Kesenian Sumatera Barat 2005. Selain sudah menulis buku "*Tambiluak*" (Tentang PDRI & Peristiwa Situjuah), karyanya juga pernah dimuat dalam buku antologi puisi berjudul "*Dua Episode Pacar Merah*", antologi Cerpen Balai Bahasa Padang, dan lembaran humaniora Harian KOMPAS.



RENDRA TRISNADI

Merupakan wartawan dan fotografer *freelance* di Kota Payakumbuh. Mewarisi bakat menulis dari ayahnya (Alm) H Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie. Pernah menjadi Korda Harian Umum SINGGALANG Payakumbuh/Limapuluh Kota, wartawan Harian Pagi Sijori Mandiri Batam, Harian Pagi Posmetro Padang, dan reporter Harian Umum Rakyat Sumbar Utara. Karya-karyanya terutama foto, sudah dimuat *Republika*, *Media Indonesia*, *Seputar Indonesia*, *Koran Tempo*, dan ratusan media massa nasional maupun internasional.